Keterbukaan Informasi di Kalimantan Timur

OLEH

MUHAMMAD KHAIDIR

Dasar Hukum

UU 14 tahun 2008 tentang KIP

UU 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

UU 43 tahun 2009 tentang Kearsipan

Peraturan Pemerintah (PP) 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 (revisi Perki 1 tahun 2010) tentang Standar Layanan Informasi Publik

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Permendagri 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kemendagri dan Pemda

Perda Provinsi Kaltim Nomor 15 tahun tahun 2012 tentang Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemprov Kaltim

UU NO.23 TH.2014

BAB XXII INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 391

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas:
 - a. informasi pembangunan Daerah; dan
 - b. informasi keuangan Daerah.
- (2) Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam suatu sistem informasi Pemerintahan Daerah.



- 1. Kondisi Geografis Daerah
- 2. Demografi
- 3. Potensi Sumber Daya Daerah;
- 4. Ekonomi dan Keuangan Daerah;
- 5. Aspek Kesejahteraan Masyarakat;
- 6. Aspek Pelayanan Umum; Dan
- 7. Aspek Daya Saing Daerah.



☐ Memuat Informasi : Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Dan Laporan Keuangan

Survei Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di Kalimantan Timur 2021

Melibatkan 9 Informan Ahli di Kaltim berasal dari unsur pemerintah, akademisi, ekonom dan masyarakat umum

Daftar Pertanyaan:

- 1. Lingkungan Fisik dan Politik
- 1.1 Kebebasan Mencari Informasi tanpa rasa takut kisaran nilai 83,6 persen (baik)
- 1.2 Akses atas Informasi dan Diseminasi Informasi Badan Publik kisaran nilai 77,7 persen (sedang)
- 1.3 Ketersediaan Informasi yang Akurat, Jelas/Terpercaya, dan Terbarui kisaran nilai 77,6 persen (sedang)
- 1.4 Partisipasi Publik kisaran nilai 73,4 persen (sedang)
- 1.5 Literasi Publik atas Hak Keterbukaan Informasi kisaran nilai 79,7 persen (sedang)
- 1.6 Proposionalitas Pembatasan Keterbukaan Informasi kisaran nilai 79,9 persen (sedang)

Survei Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di Kalimantan Timur 2021

2. Lingkungan Ekonomi

- 2.1 Biaya Murah dan Cepat untuk Mendapatkan Informasi kisaran nilai 80 persen ke atas (baik)
- 2.2 Tata Kelola Informasi Badan Publik kisaran nilai 80 persen ke atas, bahkan ada informan ahli memberikan nilai 100
- 2.3 Dukungan Anggaran bagi Komisi Informasi Daerah kisaran nilai 73,3 (sedang)
- 2.4 Kemanfaatan Informasi bagi Publik kisaran nilai 73,3 (sedang)
- 2.5 Keberagaman Kepemilikan Media kisaran nilai di atas 80 persen (sangat baik)
- 2.6 Keberpihakan Media pada Keterbukaan Informasi kisaran nilai di atas 80 persen (sangat baik)
- 2.7 Transparansi kisaran nilai rata-rata 70 persen (sedang)

Survei Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di Kalimantan Timur 2021

3. Lingkungan Hukum

- 3.1 Jaminan Hukum Terhadap Akses atas Informasi Publik kisaran nilai 88,6 persen (sangat baik)
- 3.2 Kebebasan Menyebarkan Informasi kisaran nilai 90 persen (sangat baik)
- 3.3 Perlindungan bagi Pemohon Informasi Publik kisaran nilai di atas 89 persen (sangat baik)
- 3.4 Kebebasan dari Penyalahgunaan Informasi kisaran nilai 75 persen (sedang)
- 3.5 Perlindungan Hukum bagi Whistleblower kisaran nilai 80 persen (baik)
- 3.6 Kepatuhan Menjalankan UU KIP kisaran nilai 77,7 persen (sedang)
- 3.7 Ketersediaan Mekanisme Penyelesaian Perkara Informasi Secara Independen di Tingkat Nasional dan Lokal kisaran nilai 89,9 persen (sangat baik)

Survei Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di Kalimantan Timur 2021

Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) berisikan data, fakta, dan informasi tentang perkembangan keterbukaan informasi, diharapkan mampu menggambarkan keadaan, kemajuan, proses, dan capaian secara faktual dan komprehensif terkait pelaksanaan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Kalimantan Timur.

Untuk hasil survei, akhirnya didapatkan angka IKIP Kaltim adalah di kisaran 80,01 persen yang merupakan penilaian dalam kategori cukup baik. Angka ini berkelindan dengan Pemprov Kaltim yang meraih predikat informatif dalam Pemeringkataan Komisi Informasi Pusat di tahun 2020.

TERIMA KASIH